



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**Transparansi Anggaran Hubungannya Dengan Kepercayaan Publik:
Studi Pada Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Alfian Tara Maulana

221003742019542

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TRANSPARANSI ANGGARAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK :
STUDI PADA KELURAHAN PANGGANG, KECAMATAN JEPARA, KABUPATEN
JEPARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ALFIAN TARA MAULANA
NPM : 221003742019542

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

DR. SRI PURWANINGSIH, SH.MHUM
NUPTK : 7459736637230043

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. BENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

2.2	Tinjauan Umum Tentang Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Konteks Transparansi Anggaran	14
2.2.1	Pengertian Good Governance	14
2.2.2	Prinsip Transparansi dalam Good Governance.....	18
2.2.3	Akuntabilitas dan Partisipasi sebagai Penopang Transparansi	19
2.3	Dasar Hukum Transparansi Anggaran di Indonesia	20
2.3.1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..	20
2.3.2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	21
2.3.3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	21
2.3.4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).....	22
2.3.5	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.3.6	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.3.7	Prinsip Umum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	24
2.4	Konsep Kepercayaan Publik	25
2.4.1	Definisi dalam Teori Administrasi Publik	25

2.4.2	Administrasi Publik dan Transparansi sebagai Instrumen Tata Kelola	26
2.4.3	Perspektif <i>Good Governance</i> dalam Administrasi Kelurahan.....	27
2.4.4	Relevansi Transparansi Anggaran terhadap Kepercayaan Publik ..	28
2.5	Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Kelurahan.....	29
2.5.1	Kedudukan Hukum Kelurahan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah	29
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Pendekatan Penelitian	38
3.2	Spesifikasi Penelitian	38
3.3	Lokasi Penelitian.....	39
3.4	Jenis dan Sumber Data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Teknik Analisis Data.....	41
3.7	Populasi dan Sampel	41
3.8	Keabsahan Data.....	42
3.9	Sistematika Analisis	43
BAB IV PEMBAHASAN.....		44
4.1	Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	44
4.2	Pelaksanaan Transparansi Anggaran di Kelurahan Panggang.....	54

4.2.1	Prespektif Aparatur Kelurahan.....	54
4.2.2	Prespektif Masyarakat Kelurahan Panggang	63
4.3	Persepsi dan Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Kelurahan.....	71
4.3.1	Dinamika Komunikasi dan Persepsi antara Aparat dan Masyarakat	71
4.3.2	Efektivitas Transparansi dalam Membangun Legitimasi Pemerintahan.....	74
4.3.3	Dampak Keterbukaan Informasi terhadap Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat	76
4.4	Analisis Hubungan Transparansi Anggaran dan Kepercayaan Publik ..	79
4.5	Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran	81
4.6	Kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	82
4.7	Dampak Hukum dan Sosial dari Ketidakkonsistenan Pelaksanaan Transparansi.....	83
4.8	Hubungan Transparansi Anggaran dengan Kepercayaan Publik.....	85
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	100

ABSTRAKSI

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan transparansi anggaran dan hubungannya dengan kepercayaan publik di Kelurahan Panggang. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian deskriptif analitis ini. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Panggang, Kabupaten Jepara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan transparansi anggaran dilaksanakan secara cukup baik. Mekanisme partisipatif Musrenbang menjadi tulang punggung perencanaan. Sosialisasi anggaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Laporan Pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam forum terbuka. Masyarakat mengakses informasi melalui papan pengumuman dan grup WhatsApp. Tingkat keterbukaan pemerintah dinilai cukup memadai oleh warga. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran mengalami peningkatan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan menunjukkan tren positif. Kesesuaian laporan dengan realisasi fisik memperkuat keyakinan masyarakat. Transparansi berhasil mengurangi prasangka dan spekulasi negatif. Hubungan positif antara transparansi dan kepercayaan teridentifikasi jelas. Implementasi prinsip good governance berjalan cukup konsisten. Kendala utama berupa keterbatasan kapasitas aparatur dan infrastruktur digital. Penelitian menyimpulkan transparansi anggaran merupakan instrumen strategis membangun kepercayaan. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan inovasi penyajian informasi dan kapasitas aparatur.

Kata Kunci: Transparansi Anggaran, Kepercayaan Publik, Good Governance, Kelurahan Panggang, Administrasi Publik, Yuridis Empiris, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Komunikasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan.